

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BINTAN

2.1 Gambaran Wilayah

2.1.1 Letak Geografis

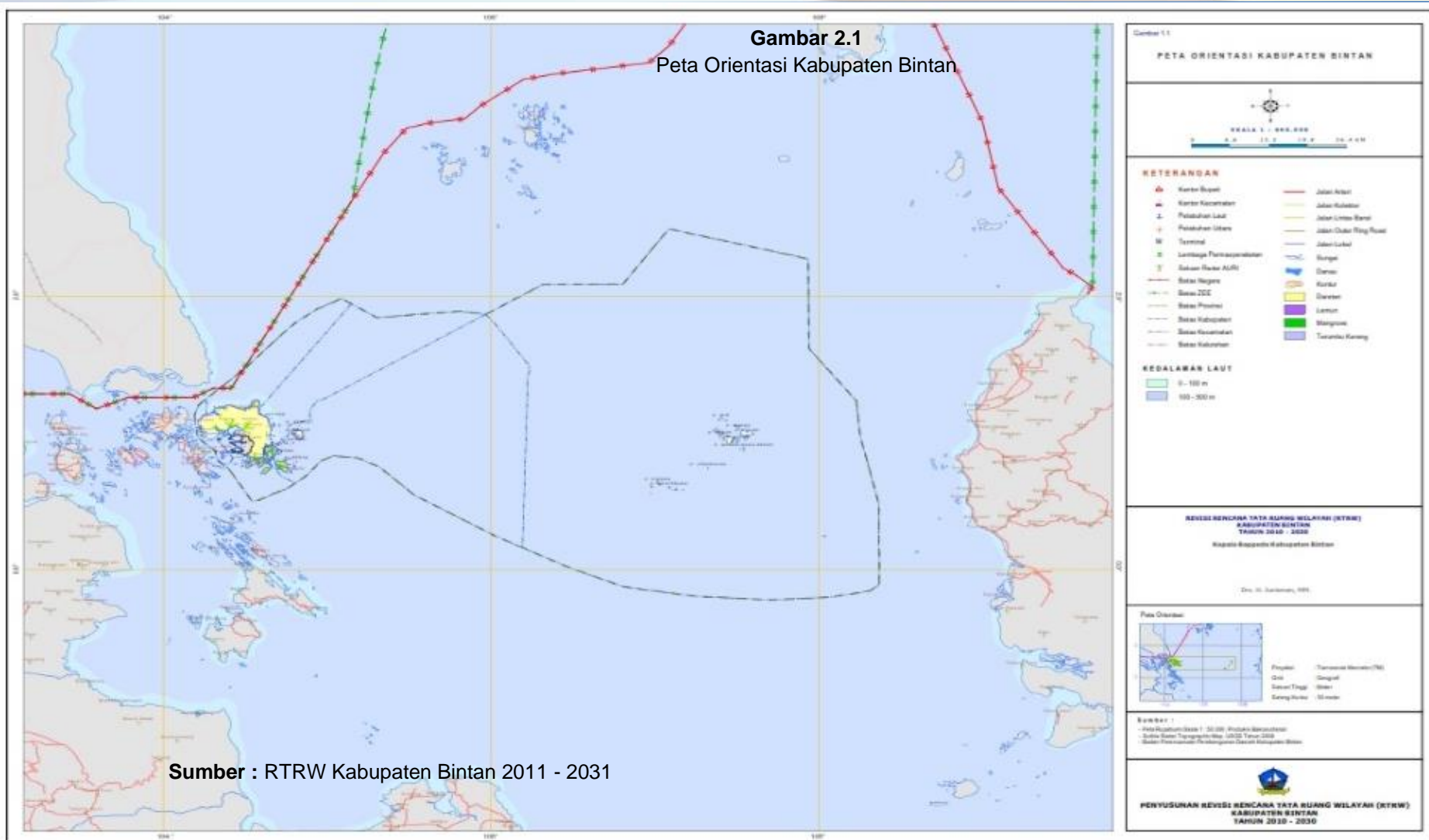
Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 0°06'17" - 1°34'52" Lintang Utara dan 104°12'47" Bujur Timur di sebelah Barat - 108° 02' 27" Bujur Timur di sebelah Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Natuna dan Malaysia Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
- Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang
- Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat

Wilayah Kabupaten Bintan berupa daerah kepulauan dengan satu pulau utama yaitu Pulau Bintan. Daratan Kabupaten Bintan terletak pada pulau utama (*mainland*) Pulau Bintan dan pulau-pulau di sekitar Pulau Bintan. Di antara pulau-pulau yang membentuk wilayah Kabupaten Bintan ini terdapat gugusan pulau-pulau yang relatif jauh jaraknya dari pulau Pulau Bintan yaitu gugusan pulau-pulau di Kecamatan Tambelan yang wilayahnya berdekatan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Jarak relatif menurut garis lurus antara sisi timur Pulau Bintan dengan Pulau Tambelan, sebagai pulau utama di Kecamatan Tambelan adalah ± 326 km atau 176 mil laut (nautical miles). Pada Gambar 2.1 diperlihatkan posisi geografis wilayah Kabupaten Bintan tersebut dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.

Berdasarkan data dari publikasi Kabupaten Bintan Dalam Angka Tahun 2016 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau, jumlah pulau yang ada dan telah bernama sejumlah 240 pulau (termasuk pulau terbesar yaitu Pulau Bintan). Dari ke-240 pulau tersebut, sebanyak 39 pulau telah berpenghuni dan sejumlah 201 pulau lainnya tidak/belum berpenghuni dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 88.038,54 Km² yang terdiri dari daratan seluas 1.313,86 Km² (1,49 %) dan Lautan seluas 86.724,68 Km² (98,51%).



Sumber : RTRW Kabupaten Bintan 2011 - 2031

2.1.2 Kondisi Fisik

A. Klimatologi

Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis dengan temperatur rata rata terendah 23,90° dan tertinggi rata-rata 31,80° dengan kelembaban udara sekitar 85%. Gugusan pulau-pulau di Kabupaten Bintan memiliki curah hujan cukup tinggi dengan iklim basah berkisar antara 2000– 2500 mm/th. Rata-rata curah hujan per tahun \pm 2.214 milimeter dengan hari hujan sebanyak \pm 110 hari. Curah hujan tertinggi pada umumnya terjadi pada bulan Desember (347 mm), sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus (101 mm). Temperatur rata-rata terendah 22,50C° dengan kelembaban udara 83%-89%. Kabupaten Bintan memiliki 4 (empat) macam perubahan arah angin yaitu:

- Bulan Desember-februari : Angin Utara
- Bulan Maret-Mei : Angin Timur
- Bulan Juni-Agustus : Angin Selatan
- Bulan September-November : Angin Barat

Kecepatan angin terbesar adalah 9 *knot* pada bulan Desember-Januari, sedangkan kecepatan angin terendah pada bulan Maret-Mei. Kondisi angin pada umumnya dalam satu tahun terjadi empat kali perubahan angin; bulan Desember - Pebruari bertiup angin utara, bulan Maret – Mei bertiup angin timur, bulan Juni – Agustus bertiup angin selatan dan bulan September – Nopember bertiup angin barat. Angin dari arah utara dan selatan yang sangat berpengaruh terhadap gelombang laut menjadi besar. Sedangkan angin timur dan barat kondisi gelombang laut relatif kecil. Kondisi tiupan angin di atas perairan Pulau Bintan yang menyebabkan gelombang dan arus adalah angin utara dan barat laut dimana angin tersebut umumnya bertiup pada bulan Juni hingga Agustus. Gelombang di perairan Bintan sebelah utara pada musim angin bisa mencapai ketinggian 2 (dua) meter.

B. Topografi

Wilayah Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil pada umumnya merupakan daerah dengan dataran landai di bagian pantai. Kabupaten Bintan memiliki topografi yang bervariasi dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-3% hingga diatas 40% pada wilayah pegunungan. Sedangkan ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Bintan berkisar antara 0 – 50 meter diatas permukaan laut hingga mencapai ketinggian 400-an meter diatas permukaan laut. Secara umum topografi Kabupaten Bintan dibagi menjadi dua *cluster* yaitu *cluster* Pulau Bintan dan Gugusan Pulau Tambelan.



1) Pulau Bintan

Wilayah Pulau Bintan memiliki keadaan topografi bervariasi dari datar hingga bergelombang dengan kemiringan 0 - 40% hingga 98,03%. Sedangkan untuk kemiringan > 40 % hanya mencapai 1,97 % yang tersebar di wilayah Gunung Bintan, Gunung Kijang dan Gunung Lengkuas. Jika diuraikan secara rinci, maka kemiringan lereng 0 - 3 % memiliki luas sebesar 742,34 Km² (41,78 %), kemiringan 3 - 15 % dengan luas wilayah 334,57 Km² (18,83 %), sedangkan kemiringan 15 - 40 % sebesar 664,88 Km² (37,42 %) dan kemiringan > 40 % dengan luas wilayah 34,92 Km² (1,97 %).

Kemiringan lereng di Kecamatan Teluk Bintan yang didominasi oleh kemiringan 0 - 3% dengan ketinggian rata-rata 3 (tiga) meter di atas permukaan laut seluas 103,60 Km² atau 56% dari luas daratan yang menyebar di seluruh wilayah Kecamatan Teluk Bintan. Wilayah datar sampai berombak (>3 – 15%) dengan ketinggian mencapai 15 meter seluas 46,15 Km² menyebar di bagian selatan terutama di wilayah kepulauan (Pulau Pengujan, Pulau Pangkil dan pulau lainnya). Lereng >15 - 40% dengan ketinggian mencapai 40 meter, merupakan daerah perbukitan yang sebarannya berada di bagian tengah seluas 31,45 Km². Sedangkan wilayah bergelombang sampai berbukit (>40%) dengan ketinggian antara 40-348 meter sebarannya mendominasi di Wilayah Desa Tembeling dan Desa Bintan Buyu (Gunung Bintan) seluas 3,8 Km².

Pada Kecamatan Bintan Utara, kemiringan datar 0 - 3% mendominasi tingkat kemiringan terbesar seluas 282,42 Km² atau 45% dari luas wilayah daratan, dominasi kedua dengan kemiringan 3 – 15% seluas 263,98 Km² (42,06%), sedangkan terkecil dengan kemiringan >40% sebesar 5,88 Km² (0,94%).

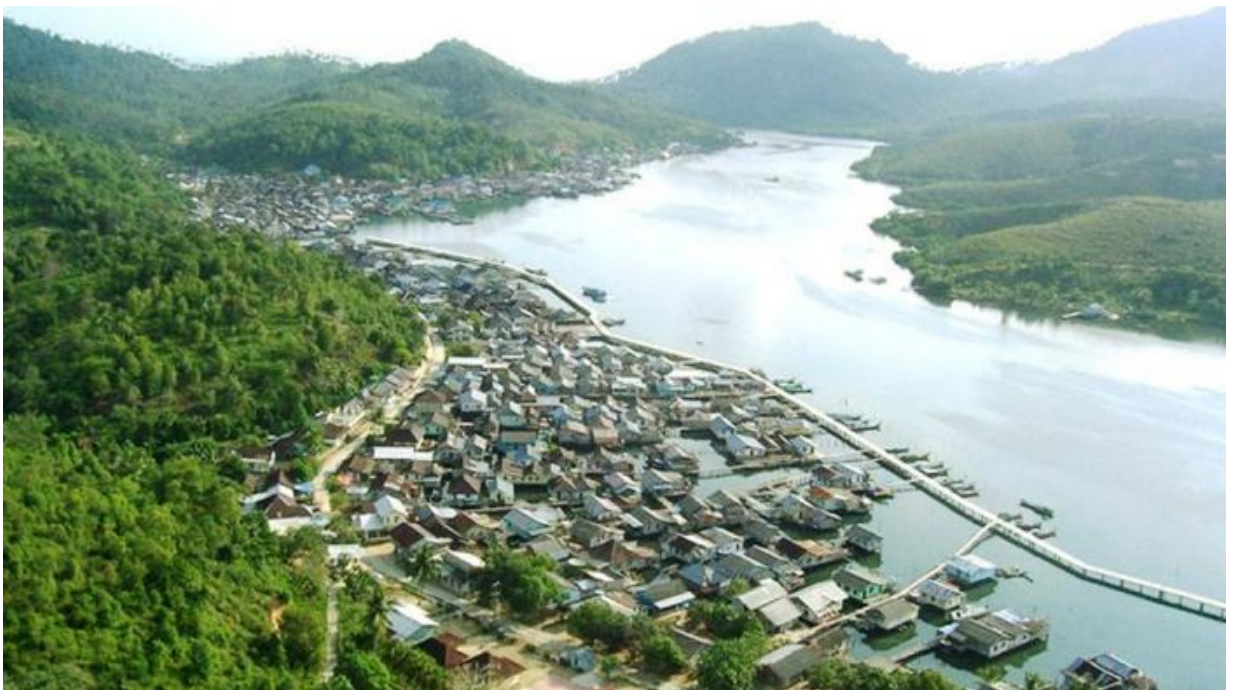
Untuk wilayah Kecamatan Bintan Timur persentase terbesar kemiringan antara 0 - 3% seluas 271,58 Km² atau 65,28% dari luas daratan. Sementara wilayah Kecamatan Gunung Kijang didominasi lahan datar sampai berombak (>3 – 15%) dengan ketinggian mencapai 15 meter menyebar di bagian Utara dan Timur Kecamatan Gunung Kijang seluas 208,29 Km² terutama di wilayah Lome, Kawal dan pesisir pantai. Wilayah berombak sampai bergelombang (>15 - 40%) dengan ketinggian mencapai 40 meter merupakan daerah perbukitan yang sebarannya berada di bagian tengah dengan total luasan ± 128,08 Km². Untuk wilayah bergelombang sampai berbukit (> 40%) dengan ketinggian antara 40-211 meter sebarannya berada di wilayah perbukitan Gunung Kijang di Desa Gunung Kijang seluas 7,5 Km².

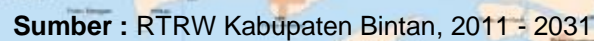
2) Gugusan Pulau Tambelan

Dominasi kemiringan pada Gugusan Pulau Tambelan berupa kemiringan datar 15 – 40% seluas 67,77 km² atau 40% dari luas daratan, sedangkan kemiringan lainnya bervariasi antara kemiringan 0 - 3% sampai dengan kemiringan >40%, dengan persentase 15% sampai 25%.

Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kabupaten Bintan relatif datar, umumnya didominasi oleh kemiringan lereng yang berkisar antara 0% - 15% dengan luasan mencapai 55,98% (untuk wilayah dengan kemiringan 0 – 3% mencapai 37,83% dan wilayah dengan kemiringan 3 – 15% mencapai 18,15%). Sedangkan luas wilayah dengan kemiringan 15 – 40% mencapai 36,09% dan wilayah dengan kemiringan > 40% mencapai 7,92%.

Gambar : 2.2 Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan







C. Hidrologi

Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil-kecil dan dangkal. Pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu. Sungai yang relatif besar terdapat di Pulau Bintan yang terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Dua diantaranya adalah DAS Jago seluas 135,8 km² dan DAS Kawal seluas 93,0 km² yang digunakan sebagai sumber air minum. Secara umum daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Bintan disajikan dalam tabel 2.1 dan Gambar 2.3 berikut ini.

Tabel 2.1
Luas Sungai Kabupaten Bintan

NO	LOKASI / NAMA DAS	LUAS DAS		NO	LOKASI / NAMA DAS	LUAS DAS	
		Hektar	Km ²			Hektar	Km ²
A	PULAU BINTAN			B	GUGUSAN PULAU BINTAN		
A.1	ANCULAI	9243.17	92.43	B.1	TONGKENG	61.32	0.61
A.2	ANGGUS	2638.46	26.38	B.2	KAPAL	13.27	0.13
A.3	BERU	2279.48	22.79	B.3	HANTU	395.23	3.95
A.4	BINTAN	6613.47	66.13	B.4	BUTON	1291.89	12.92
A.5	EKONG	5468.46	54.68	B.5	POTO	1422.21	14.22
A.6	ELANG	3732.47	37.32	B.6	KELONG	1778.64	17.79
A.7	GALANG BATANG	4873.08	48.73	B.7	BUNUT	70.60	0.71
A.8	GESEK	13022.49	130.22	B.8	GIN BESAR	2277.99	22.78
A.9	JAGO	20578.86	205.79	B.9	KEKIP	91.05	0.91
A.10	KALANG TUA	4109.84	41.10	B.10	MANTANG	2017.84	20.18
A.11	KANGBOI	8648.38	86.48	B.11	TELAN	949.50	9.49
A.12	KAWAL	14393.62	143.94	B.12	SIULUK	1428.41	14.28
A.13	KECIL	2865.72	28.66	B.13	NUMBING	1361.18	13.61
A.14	KIJANG	3959.11	39.59	B.14	MAPUR	2817.66	28.18
A.15	PENGUDANG	2750.84	27.51	B.15	UJAN	514.34	5.14
A.16	SODO	4016.48	40.16	B.16	PANGKIL	281.87	2.82
				B.17	LOBAM	490.08	4.90

Sumber : KLHS RTRW Kabupaten Bintan





D. Pasang Surut

Pasang surut adalah salah satu faktor dasar dalam pengkajian arus dilaut. Kenaikan massa air laut samudera atau laut luas secara vertikal adalah gaya tarik benda-benda angkasa terutama bulan dan matahari. Massa air yang naik akan merambat dari samudera atau laut lepas secara horizontal ke perairan dalam seperti perairan Indonesia. Faktor yang mempengaruhi pasang surut ini antara lain adalah posisi bulan dan matahari terhadap bumi serta situasi morfologi setempat seperti berkurangnya kedalaman, keadaan ini terjadi pada tempat-tempat yang sempit seperti teluk dan selat sehingga menimbulkan dominasi arus pasang surut.

Di Kabupaten Bintan hampir sebagian besar perairan di pengaruhi oleh pasang surut air laut, tingkat muka air sungai bervariasi sehingga terjadi banjir lokal oleh air laut. Pasang di perairan Bintan merupakan rambatan pasang dari Laut Cina Selatan yang identik dengan pasang di perairan Bintan. Pola pasang surut cenderung semi diurnal (mixed tide prevailing semidiurnal), terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari. Namun dua pasang tersebut tidak sama besarnya.

Hal ini diakibatkan oleh posisi geografis wilayahnya yang terletak pada pertemuan perambatan pasang surut Samudera Hindia melalui Selat Malaka dan dari Samudera Pasifik melalui Laut Cina Selatan sehingga menyebabkan perairan Kepulauan Riau memiliki arus pasang surut dengan pola bolak-balik (reversing tide current).

Hasil prediksi pasang surut dengan menggunakan Oritide-Global Tide Model di sekitar perairan pantai Trikora (Kecamatan Gunung Kijang) diketahui bahwa pada bulan Juli memperlihatkan tinggi rata-rata air pasang tertinggi +73,48 cm dan air surut terendah -121,31 cm dengan tunggang maksimum sekitar 194,79 cm. Dan pada bulan September tinggi rata-rata air pasang tertinggi +75,69 cm, air surut terendah -101,06 cm dengan tunggang maksimum sekitar 176,75 cm.

2.1.3 Batas Administrasi

Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten Induk di Provinsi Kepulauan Riau yang terbentuk berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956 dengan nama daerah otonom Kabupaten Kepulauan Riau. Seiring dengan perkembangan dan pemekaran wilayah sejak tahun 1983 hingga tahun 2004, Kabupaten Bintan telah mengalami 4 kali perkembangan wilayah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 yang pada akhirnya Kabupaten Kepulauan Riau mulai menggunakan nama Kabupaten Bintan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006.

Pada Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan pemekaran wilayah melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan



Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong. Selain itu Pemekaran Kecamatan juga dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, dengan rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.4.

Tabel 2.2
Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa	Luas Wilayah			
		Administrasi		Terbangun	
		(Ha)	(%) thd total	(Ha)	(%) thd total
Kecamatan Gunung Kijang	4	22.189	16,83%	1.834,989	8,27%
Kecamatan Bintan Timur	4	9.951	7,34%	3.848,21	38,67%
Kecamatan Bintan Utara	5	4.324	3,27%	841,46	19,46%
Kecamatan Teluk Bintan	6	12.541	9,27%	571,87	4,56%
Kecamatan Tambelan	8	9.042	6,34%	140,1451	1,55%
Kecamatan Teluk Sebong	7	29.429	22,14%	2.174,818	7,39%
Kecamatan Toapaya	4	15.009	11,37%	753,4478	5,02%
Kecamatan Mantang	4	6.368	5,15%	75,14228	1,18%
Kecamatan Bintan Pesisir	4	11.619	9,05%	297,4572	2,56%
Kecamatan Seri Kuala Lobam	5	11.780	9,24%	1334,637	11,33%
TOTAL	51	132.252	100%	11.872,17	100,00%

Sumber : RTRW Kabupaten Bintan, 2011 - 2031

Gambar : 2.5



Sumber : RTRW Kabupaten Bintan, 2011 – 2031



2.1.4 Demografi Wilayah

2.1.4.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Pada Juli Tahun 2017 penduduk Kabupaten Bintan tercatat sebesar 151,248 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebesar 77,808 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebesar 73,440 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bintan Timur sejumlah 43,359 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Mantang sejumlah 4.279 jiwa.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kelurahan dan Desa Berdasarkan Jenis Kelamin

NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN/DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
GUNUNG KIJANG	Gunung Kijang	1,297	1,152	2,449
	Kawal	3,361	3,176	6,537
	Malang Rapat	1,253	1,070	2,323
	Teluk Bakau	1,079	995	2,074
Total Penduduk Kec. Gunung Kijang		6,990	6,393	13,383
BINTAN TIMUR	Gunung Lengkuas	3,152	2,912	6,064
	Kijang Kota	14,021	13,265	27,286
	Sungai Enam	1,304	1,261	2,565
	Sungai Lekop	3,776	3,668	7,444
Total Penduduk Kec. Bintan Timur		22,253	21,106	43,359
BINTAN UTARA	Lancang Kuning	699	700	1,399
	Tg. Kota	4,254	4,098	8,352
	Tg. Uban Selatan	3,119	3,021	6,140
	Tg. Uban Timur	669	623	1,292
	Tg. Uban Utara	2,494	2,440	4,934
Total Penduduk Kec. Bintan Utara		11,235	10,882	22,117
TELUK BINTAN	Bintan Buyu	1,282	1,272	2,554
	Pangkil	668	651	1,319
	Penaga	996	888	1,884
	Pengujan	718	662	1,380
	Tembeling	622	580	1,202
	Tembeling Tanjung	1,390	1,200	2,590
Total Penduduk Kec. Teluk Bintan		5,676	5,253	10,929
TAMBELAN	Batu Lepuk	282	249	531
	Kampung Hilir	687	639	1,326
	Kampung Melayu	314	314	628
	Kukup	418	378	796
	Pulau Mentebung	119	127	246
	Pulau Pengikik	63	49	112
	Pulau Pinang	91	96	187
	Teluk Sekuni	400	410	810
Total Penduduk Kec. Tambelan		2,374	2,262	4,636
TELUK SEBONG	Berakit	958	924	1,882
	Ekan Aculai	980	961	1,941
	Kota Baru	1,186	1,089	2,275
	Pengudang	611	528	1,139

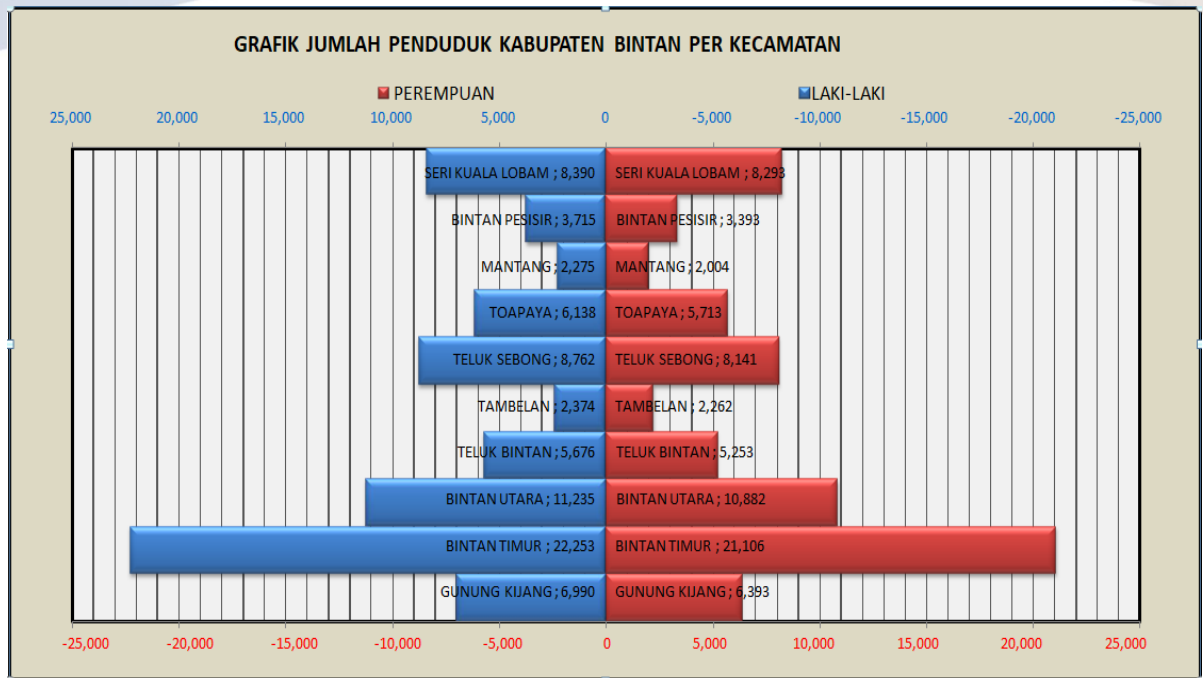


NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN/DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
	Sebong Lagoi	1,910	1,743	3,653
	Sebong Pereh	2,011	1,866	3,877
	Sri Bintan	1,106	1,030	2,136
<i>Total Penduduk Kec. Teluk Sebong</i>		8,762	8,141	16,903
TOAPAYA	Toapaya	797	704	1,501
	Toapaya Asri	1,933	1,845	3,778
	Toapaya Selatan	2,638	2,473	5,111
	Toapaya Utara	770	691	1,461
<i>Total Penduduk Kec. Toapaya</i>		6,138	5,713	11,851
MANTANG	Dendun	529	474	1,003
	Mantang Baru	505	479	984
	Mantang Besar	719	621	1,340
	Mantang Lama	522	430	952
<i>Total Penduduk Kec. Mantang</i>		2,275	2,004	4,279
BINTAN PESISIR	Air Glubi	485	478	963
	Kelong	1,195	1,139	2,334
	Mapur	493	434	927
	Numbing	1,542	1,342	2,884
<i>Total Penduduk Kec. Bintan Pesisir</i>		3,715	3,393	7,108
SERI KUALA LOBAM	Busung	694	666	1,360
	Kuala Simpang	921	860	1,781
	Tanjung Permai	1,804	1,795	3,599
	Teluk Lobam	1,366	1,417	2,783
	Teluk Sasah	3,605	3,555	7,160
<i>Total Penduduk Kec. Seri Kuala Lobam</i>		8,390	8,293	16,683
TOTAL PENDUDUK KAB. BINTAN		77,808	73,440	151,248

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan

Secara keseluruhan jumlah dan kepadatan penduduk per-kecamatan di Kabupaten Bintan tergambar pada grafik 2.5 berikut.

Gambar 2.6
Grafik Penduduk Per-Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan

2.1.4.2 Struktur dan Sebaran Penduduk

Berdasarkan tabel 2.3. diatas, dapat diketahui persebaran jumlah penduduk untuk tingkat kecamatan yang terbagi dalam 4 *cluster* penduduk, yaitu:

- ✚ kelompok penduduk sekitar 40.000 jiwa yang berada di Kecamatan Bintan Timur dimana pada kecamatan ini jumlah penduduknya sangat menonjol dari kecamatan-kecamatan lainnya;
- ✚ kelompok penduduk sekitar 20.000 yang berada di 3 (tiga) kecamatan, yaitu: Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluk Sebong;
- ✚ kelompok penduduk sekitar 10.000 yang berada di 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Bintan Pesisir;
- ✚ kelompok penduduk sekitar 5.000 yang berada di 2 kecamatan, yaitu: Kecamatan Tambelan dan Kecamatan Mantang.



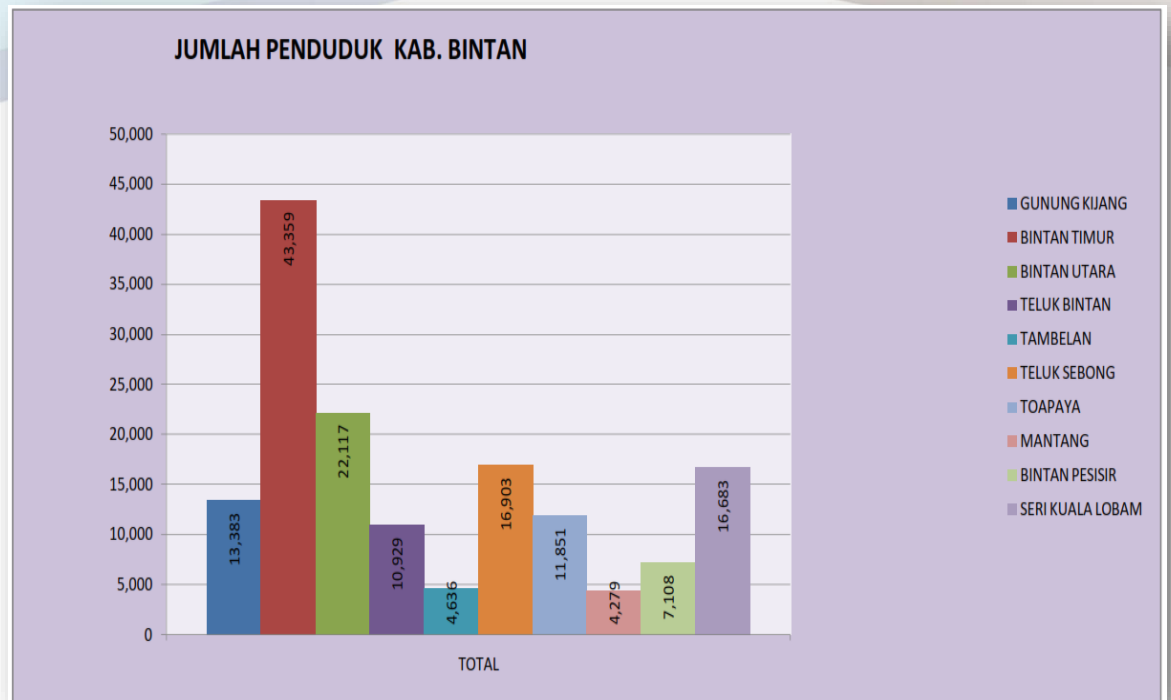
Persebaran keempat kelompok jumlah penduduk kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bintan tersebut dapat dilihat pada ilustrasi Gambar 2.7.

Selanjutnya persebaran penduduk pada Tabel 2.3 dapat mengindikasikan pengelompokan desa/kelurahan menurut jumlah penduduknya yang secara indikatif terbagi dalam 5 kelompok jumlah penduduk desa/kelurahan, yaitu:

- ✚ kelompok di atas 20.000 penduduk yang berada di Kelurahan Kijang Kota dengan jumlah penduduk sangat menonjol dari desa/kelurahan lainnya di Kabupaten Bintan;
- ✚ kelompok 5.000 – 10.000 penduduk yang tersebar di 6 (enam) desa/kelurahan, yaitu: Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Desa Teluk Sasah, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kelurahan Sungai Lekop dan Kelurahan Kawal;
- ✚ kelompok 2.000 – 5.000 penduduk yang tersebar di 15 desa/kelurahan, yaitu: Desa Bintan Buyu, Kelurahan Tembeling Tanjung, Kelurahan Tanjung Uban Utara, Desa Sebung Pereh, Desa Sebung Lagoi, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Teluk Lobam, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Sei Enam, Desa Gunung Kijang, Desa Malang Rapat, Desa Numbing, Desa Kelong, Kelurahan Toapaya Asri dan Desa Toapaya Selatan;
- ✚ kelompok 1.000 – 2.000 penduduk yang tersebar di 17 desa/kelurahan, yaitu: Desa Pangkil, Desa Pengujan, Desa Penaga, Desa Tembeling, Desa Lancang Kuning, Kelurahan Tanjung Uban Timur, Desa Ekan Aculai, Desa Sri Bentan, Desa Pengudang, Desa Berakit, Desa Kuala Sempang, Desa Busung, Desa Teluk Bakau, Desa Mantang Besar, Desa Toapaya Utara, Desa Toapaya, dan Desa Kampung Hilir; serta
- ✚ kelompok di bawah 1.000 penduduk yang tersebar di 12 desa/kelurahan, yaitu: Desa Mantang Lama, Desa Mantang Baru, Desa Dendun, Desa Mapur, Desa Air Glubi, Desa Pulau Pinang, Desa Pulau Mentebung, Desa Kampung Melayu, Kelurahan Teluk Sekuni, Desa Batu Lepuk, Desa Kukup/Air Kukup, dan Desa Pulau Pengikik.

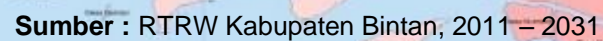
Adapun persebaran kelima kelompok jumlah penduduk Kelurahan/desa di wilayah Kabupaten Bintan dapat dilihat pada ilustrasi gambar 2.6, gambar 2.7 dan gambar 2.8 dibawah ini.

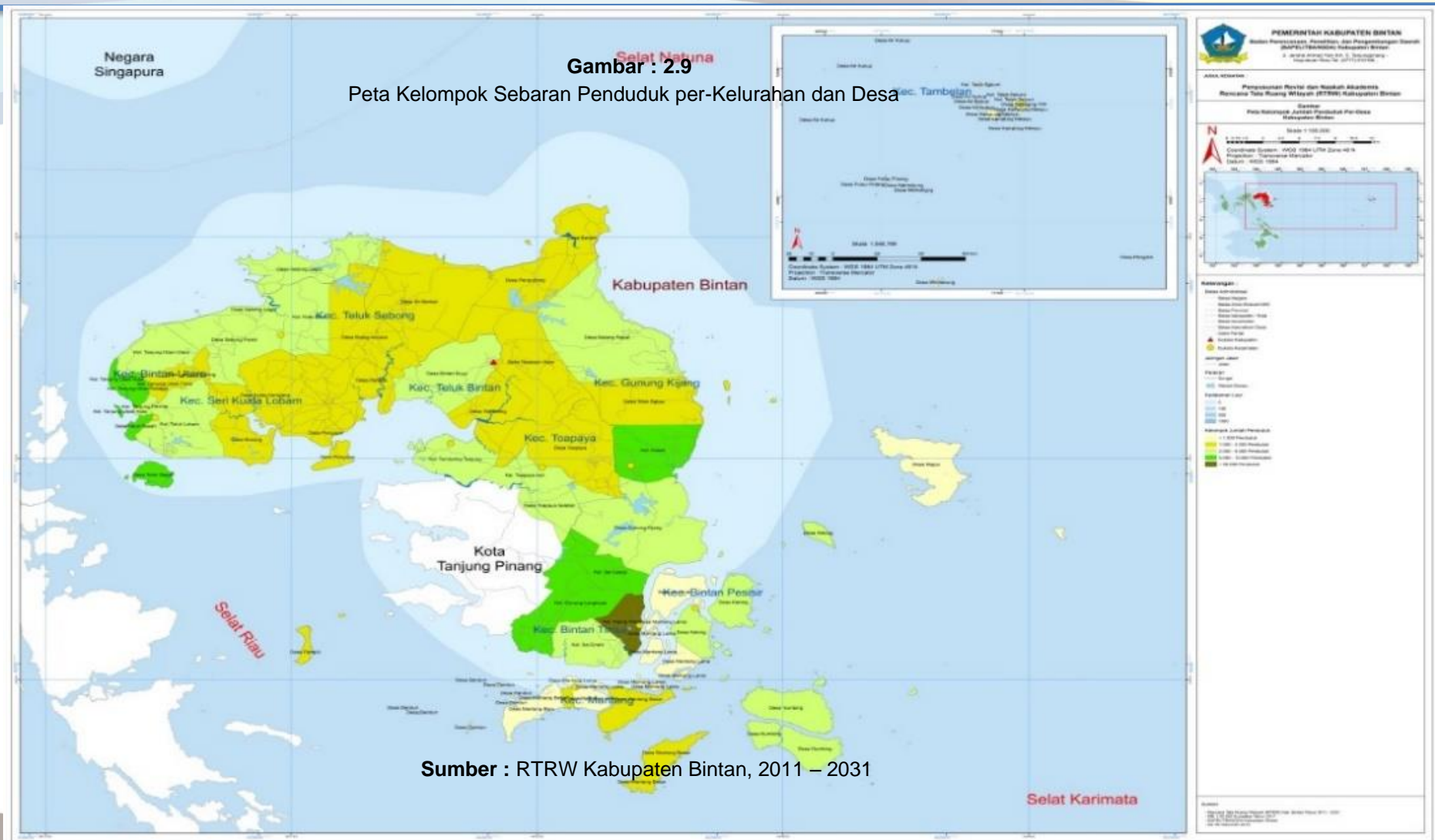
Gambar 2.7
Grafik Kelompok Penduduk Per-Kecamatan



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan

Gambar : 2.8





2.1.4.3 Proyeksi Jumlah Penduduk

Untuk menghitung Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun 2018, Kelompok Kerja Sanitasi menggunakan kecenderungan dari rata-rata *tren* pertumbuhan penduduk periode tahun 2012 - 2017 di tingkat kecamatan yang kemudian di olah menjadi rata-rata kabupaten dengan rumusan sebagai berikut :

$$P_t = P_0 \cdot e^{rt}$$

Dimana :

- P_t** : Jumlah penduduk pada tahun ke - *t*
- P₀** : Jumlah penduduk pada tahun 2018
- t** : Jangka waktu
- r** : Laju pertumbuhan penduduk
- e** : Bilangan eksponensial yang besarnya 2,718281828

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2012 yang berjumlah 141.428 jiwa, maka rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2012-2017 sebesar 1,36% per tahun. Jumlah penduduk tersebut cenderung meningkat dan berkembang sehingga diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Bintan akan mencapai 164.017 jiwa pada tahun 2022 yang terdiri dari penduduk perkotaan sejumlah 93.762 jiwa sedangkan penduduk perdesaan sejumlah 70.255 jiwa.

Dalam komposisi tingkat kepadatan penduduk di tingkat kecamatan, Bintan Timur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk kota terbesar sejumlah 43.359 jiwa. Namun demikian Kecamatan Bintan Timur tidak memiliki penduduk perdesaan. Hal tersebut bahwa penduduk perdesaan merupakan penduduk yang bermukim di wilayah administrasi perdesaan, demikian pula penduduk perkotaan adalah penduduk yang tinggal di wilayah administrasi kelurahan sehingga Kecamatan Bintan Timur yang terdiri dari 4 kelurahan namun tidak memiliki desa di kategorikan seluruh masyarakatnya adalah penduduk perkotaan.

Selanjutnya Pada tabel 2.4, 2.5 dan 2.6 diketahui pula proyeksi pertumbuhan penduduk tahun 2023 dalam satuan Jiwa dan Kepala Keluarga (KK) dimana jumlah jiwa KK terbesar juga berada di Kecamatan Bintan Timur sejumlah 11.762, sedangkan jumlah KK terkecil berada di Kecamatan Mantang sejumlah 1.160. Rumusan perhitungan rata-rata jumlah KK ini disepakati oleh anggota Pokja bahwa dalam satu KK terdiri dari 4 (orang) anggota keluarga / rumah tangga.


Tabel 2.4

Jumlah penduduk dan kepala keluarga wilayah perkotaan saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk dan KK Kawasan Perkotaan											
		Tahun											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1.	Kecamatan Teluk Bintan	2.590	648	2.663	666	2.700	675	2.738	685	2.776	694	2.815	704
2.	Kecamatan Bintan Utara	20.718	5.180	21.285	5.321	21.575	5.394	21.868	5.467	22.166	5.541	22.467	5.617
3.	Kecamatan Teluk Sebong	2.275	569	2.335	584	2.366	592	2.398	599	2.429	607	2.461	615
4.	Kecamatan SKL	6.382	1.596	6.555	1.639	6.644	1.661	6.734	1.683	6.825	1.706	6.917	1.729
5.	Kecamatan Bintan Timur	43.359	10.840	44.555	11.139	45.166	11.291	45.784	11.446	46.412	11.603	47.047	11.762
6.	Kecamatan Gunung Kijang	6.537	1.634	6.712	1.678	6.801	1.700	6.892	1.723	6.983	1.746	7.076	1.769
7.	Kecamatan Mantang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kecamatan Bintan Pesisir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kecamatan Toapaya	3.778	945	3.881	970	3.934	984	3.988	997	4.042	1.010	4.097	1.024
10.	Kecamatan Tambelan	810	203	833	208	845	211	857	214	869	217	881	220
PERKOTAAN :		86.449	21.612	88.821	22.205	90.031	22.508	91.258	22.815	92.502	23.125	93.762	23.441

Sumber : SSK Kabupaten Bintan 2018.


Tabel 2.5

Jumlah penduduk dan kepala keluarga wilayah pedesaan saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk dan KK Kawasan Pedesaan											
		Tahun											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1.	Kecamatan Teluk Bintan	8.339	2.085	8.574	2.144	8.694	2.174	8.816	2.204	8.939	2.235	9.064	2.266
2.	Kecamatan Bintan Utara	1.399	350	1.437	359	1.457	364	1.477	369	1.497	374	1.517	379
3.	Kecamatan Teluk Sebong	14.628	3.657	15.017	3.754	15.215	3.804	15.416	3.854	15.619	3.905	15.825	3.956
4.	Kecamatan SKL	10.301	2.575	10.581	2.645	10.724	2.681	10.869	2.717	11.015	2.754	11.164	2.791
5..	Kecamatan Bintan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kecamatan Gn. Kijang	6.846	1.712	7.029	1.757	7.123	1.781	7.218	1.804	7.314	1.828	7.411	1.853
7.	Kecamatan Mantang	4.279	1.070	4.396	1.099	4.456	1.114	4.517	1.129	4.578	1.144	4.640	1.160
8.	Kecamatan Bintan Pesisir	7.108	1.777	7.306	1.826	7.406	1.852	7.509	1.877	7.612	1.903	7.717	1.929
9.	Kecamatan Toapaya	8.073	2.018	8.294	2.074	8.407	2.102	8.521	2.130	8.637	2.159	8.755	2.189
10.	Kecamatan Tambelan	3.826	957	3.935	984	3.990	998	4.046	1.012	4.103	1.026	4.161	1.040
PEDESAAN		64.799	16.200	66.569	16.642	67.472	16.868	68.387	17.097	69.315	17.329	70.255	17.564

Sumber : SSK Kabupaten Bintan 2018.


Tabel 2.6

Jumlah penduduk dan kepala keluarga saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk dan KK Total											
		Tahun											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1.	Kecamatan Teluk Bintan	10.929	2.732	11.237	2.809	11.394	2.839	11.554	2.879	11.716	2.919	11.880	2.970
2.	Kecamatan Bintan Utara	22.117	5.529	22.723	5.681	23.032	5.686	23.345	5.763	23.662	5.841	23.984	5.996
3.	Kecamatan Teluk Sebong	16.903	4.226	17.352	4.338	17.581	4.388	17.813	4.446	18.048	4.504	18.287	4.572
4.	Kecamatan SKL	16.683	4.171	17.136	4.284	17.368	4.320	17.602	4.378	17.840	4.437	18.081	4.520
5.	Kecamatan Bintan Timur	43.359	10.840	44.555	11.139	45.166	11.139	45.784	11.291	46.412	11.446	47.047	11.762
6.	Kecamatan Gunung Kijang	13.383	3.346	13.741	3.435	13.924	3.459	14.109	3.505	14.297	3.551	14.487	3.622
7.	Kecamatan Mantang	4.279	1.070	4.396	1.099	4.456	1.114	4.517	1.129	4.578	1.144	4.640	1.160
8.	Kecamatan Bintan Pesisir	7.108	1.777	7.306	1.826	7.406	1.852	7.509	1.877	7.612	1.903	7.717	1.929
9.	Kecamatan Toapaya	11.851	2.963	12.176	3.044	12.341	3.072	12.509	3.114	12.679	3.156	12.852	3.213
10.	Kecamatan Tambelan	4.636	1.159	4.768	1.192	4.835	1.206	4.903	1.223	4.972	1.240	5.042	1.261
TOTAL		151.248	37.812	155.390	38.847	157.503	39.073	159.645	39.605	161.817	40.143	164.017	41.004

Sumber : SSK Kabupaten Bintan 2018.


Tabel 2.7

Tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan saat ini dan proyeksi 5 tahun

No.	Kecamatan	Tingkat Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk (Orang/Luas Area Terbangun) Ha		
			Tahun		
			n	n+5	n+10
1	Kecamatan Teluk Bintan	1,40%	19	19	20
2	Kecamatan Bintan Utara	1,36%	26	27	27
3	Kecamatan Teluk Sebong	1,32%	8	8	8
4	Kecamatan Seri Kuala Lobam	1,35%	13	13	13
5	Kecamatan Bintan Timur	1,37%	32	33	33
6	Kecamatan Gunung Kijang	1,33%	7	7	7
7	Kecamatan Mantang	1,36%	57	58	59
8	Kecamatan Bintan Pesisir	1,38%	24	24	25
9	Kecamatan Toapaya	1,36%	16	16	16
10	Kecamatan Tambelan	1,41%	33	34	34

Sumber : SSK Kabupaten Bintan 2018.

2.1.5 Sosial Budaya

Kabupaten Bintan berdasarkan latar belakang historis yang panjang merupakan bagian dari pusat budaya Melayu. Bagi penduduk asli Melayu yang telah tinggal lama di Kabupaten Bintan umumnya bermukim di pesisir baik di pulau utama Pulau Bintan (*mainland Bintan*) maupun pulau-pulau di sekitarnya termasuk di Kepulauan Tambelan. Pola permukiman umumnya cenderung memanjang sepanjang jaringan jalan pada tepian pantai (*linear*). Rumah-rumah penduduk pada awalnya berupa rumah panggung dengan konstruksi kayu yang dewasa ini masih dijumpai pada permukiman yang terletak di tepian maupun di atas perairan.

Masyarakat Melayu di Kabupaten Bintan masih sangat kental menjalani budayanya dalam kehidupan sehari-hari, diantara kegiatan budaya yang dapat dilihat hingga saat ini adalah penggunaan Bahasa Melayu sebagai media komunikasi, menganut faham Agama Islam dan aktif dalam berkesenian tradisional. Namun dengan populasi yang semakin beragam dengan banyaknya imigran yang datang baik dari wilayah lainnya di Indonesia maupun dari luar Indonesia melatar belakangi tumbuhnya budaya dari suku-suku yang lain. Suku bangsa yang menonjol diantaranya adalah suku Jawa, Cina, Batak, Bugis, Minangkabau dan lain sebagainya. Keberagaman tersebut dapat dilihat terutama pada kawasan perkotaan di Kabupaten Bintan yaitu di Kota Kijang dan Kota Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Timur dan Bintan Utara. Sejalan dengan itu penghidupan dan peri kehidupan masyarakat di Kabupaten Bintan sudah menunjukkan corak yang heterogen. Kegiatan ekonomi tidak lagi hanya pada sektor primer dan tradisional, tapi mulai beranjak jauh ke sektor-sektor modern yang mencirikan era industrialisasi. Perpaduan sosial budaya masyarakat yang mulai heterogen dengan sektor-sektor ekonomi tersebut di atas dalam penghidupan dan peri kehidupan masyarakatnya, ditambah pula dengan kedekatan geografis dan ekonomis dengan negara tetangga yang semakin memacu perkembangan masyarakat Kabupaten Bintan dari sudut sosial budaya dan perekonomian.

2.1.5.1 Perumahan dan Lingkungan

Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati menunjukkan semakin baik kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Salah satu indikator rumah sehat menurut *World Health Organization* (WHO) adalah rumah yang memiliki luas lantai minimal 10 m² per kapita. Jika satu rumah tangga memiliki empat sampai lima anggota rumah tangga, maka rumahnya dikatakan sehat bila memiliki luas lantai minimal 40 sampai 50 m². Menurut data Publikasi BPS Provinsi Kepulauan Riau melalui dokumen Bintan Dalam Angka Tahun 2017 menyatakan bahwa sekitar 59,98% rumah tangga di Kabupaten Bintan menempati rumah dengan luas 50 m² atau lebih.

2.1.5.2 Penanganan Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin

Mengacu data LKPJ Kabupaten Bintan tahun 2018, di ketahui bahwa upaya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sosial kemasyarakatan telah menunjukkan manfaat (*outcome*) cukup positif dalam menekan angka kemiskinan. Di tahun 2017 angka penduduk miskin di Kabupaten Bintan menurun menjadi 5,90% dari kondisi tahun sebelumnya 6,07%.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk miskin per Kecamatan

NO.	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
1.	KecamatanTeluk Bintan	643
2.	Kecamatan Bintan Utara	1.303
3.	Kecamatan Teluk Sebong	999
4..	Kecamatan Seri Kuala Lobam	982
5.	Kecamatan Bintan Timur	2.561
6.	Kecamatan Gunung Kijang	785
7.	Kecamatan Mantang	250
8.	Kecamatan Bintan Pesisir	419
9.	Kecamatan Toapaya	480
10.	Kecamatan Tambelan	277
TOTAL		8.699

Sumber : SSK Kabupaten Bintan 2018.

Dari tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan Mantang merupakan kecamatan dengan jumlah KK miskin terendah sejumlah 250 kepala keluarga dari total jumlah KK seluruhnya sebesar 1.070 KK. Sedangkan kecamatan tertinggi angka kemiskinannya berada di Kecamatan Bintan Timur sejumlah 2.561 KK dari total jumlah KK sebesar 10.840 KK.

Rumah Tangga Miskin Yang Ditangani

Pada tahun 2017 jumlah keluarga miskin yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan mencapai 4.595 Keluarga Miskin melalui kegiatan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan bantuan tunai bersyarat / program keluarga harapan. Selain kegiatan tersebut juga dilakukan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk 195 unit rumah terdiri dari 125 Unit rumah sasaran yang



bersumber dari dana APBD sebesar Rp.2.738.000.000,- dan 70 unit rumah sasaran yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial RI sebesar Rp.1.500.000.000,-.

2.1.6 Rencana Tata Ruang Wilayah

Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan sedang tahap pelaksanaan revisi dalam rangka penyesuaian rencana tata ruang wilayah yang lebih dinamis untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup.

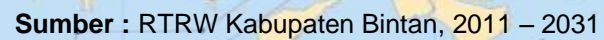
Kegiatan revisi RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2017/2018 dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 26 ayat 5 Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa *“Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun”*, Mengacu Undang-Undang tersebut, maka pada tahun 2016 silam telah dilakukan peninjauan kembali RTRW yang disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan 2011-2031 direkomendasikan untuk direvisi dan disusun kembali naskah akademisnya.

Mengacu dokumen revisi RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2017, tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bintan adalah mewujudkan Kabupaten Bintan yang madani dan sejahtera melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan Negara yang bernilai strategis.

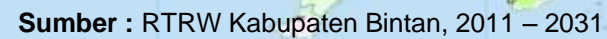
Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten Bintan sebagai berikut :

- a. pengembangan fungsi-fungsi perekonomian Kabupaten Bintan untuk mengakomodasikan kebutuhan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
- b. perwujudan pembangunan wilayah Kabupaten Bintan sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan negara yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya;
- c. pemanfaatan potensi sumber daya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah melalui penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya;
- d. optimasi pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah; serta
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Gambar : 2.10



Gambar : 2.11





2.1.7 Visi dan Misi Pemerintah Daerah

2.1.7.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025

1. Visi Jangka Panjang

Visi jangka panjang pembangunan Kabupaten Bintan adalah **“BINTAN GEMILANG 2025” Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Kebudayaan**. Yaitu membangun manusia secara utuh sehingga mencapai derajat

sejahtera lahir maupun batin. Hal ini juga didasarkan proyeksi masa depan Kabupaten Bintan dimana kunci pokok pembangunan ke depan adalah pembangunan seluruh aspek kehidupan yang menyempurnakan karakter dan taraf hidup masyarakat menuju sejahtera.

2. Misi Jangka Panjang

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi kelautan dan pariwisata secara berkelanjutan sebagai daya dukung dan daya ungkit pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah guna menunjang peningkatan perekonomian daerah;
4. Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang peduli terhadap kualitas pelayanan masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip penatausahaan pemerintahan yang baik (good governance);
5. Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu yang Agung dengan tetap bersandar kepada nilai-nilai agama. sehingga tercipta hubungan kekerabatan yang harmonis dan iklim yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan secara komprehensif;
7. Meningkatkan daya saing daerah dalam skala nasional dan internasional

2.1.7.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan

Dengan telah terpilih dan dilantiknya Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan masa bakti tahun 2016-2021, yakni pada tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-230 Tahun 2016 Tentang

Pengesahan Pengangkatan Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.21-231 Tahun 2016



Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau, maka melekat kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Bintan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan RPJM Provinsi Kepulauan Riau, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka yang bersifat indikatif yang dibiayai oleh APBD dan sumber dana lainnya yang dapat diperoleh dari APBD

Provinsi, APBN maupun sektor swasta. RPJMD tetap memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RAPBD, penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, sebagai tolok ukur kinerja Kepala Daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagaimana diketahui pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2005-2010), Tahap II (2010-2015), Tahap III (2016-2021), Tahap IV (2021-2025).



1. Visi Jangka Menengah

Visi Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 adalah : “Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintan Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)”. Adapun penjelasan visi tersebut berdasarkan kata kunci adalah sebagai berikut : Madani : (1) Masyarakat yang beradab dan agamis; (2) menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; (3) masyarakat yang demokratis; (4) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (5) Program-program pembangunan berbasis masyarakat Madani merupakan perwujudan dari masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted. Masyarakat madani adalah konsep yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus. Sejahtera : (1) Kesehatan; (2) Pendidikan (3) Daya beli; Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Bintan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi daerah lainnya. Bintan Gemilang 2025 Gerakan Melangkah Maju di Bidang: (1) Kelautan; (2)Pariwisata; (3) Kebudayaan, memiliki arti “Gerakan Melangkah Maju”, gerakan yang dimaksud merupakan gerakan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk lebih maju yang melibatkan secara aktif seluruh pihak di kabupaten Bintan dengan jangka waktu target capaian sampai tahun 2025. Pembangunan dikembangkan sesuai potensi dan keunggulan kabupaten Bintan, yaitu sektor kelautan dan pariwisata sebagai core dan sekaligus sebagai driver activity. Serta dengan melestarikan dan memajukan seluruh hasil kegiatan dan penciptaan akal budi masyarakat seperti kesenian,dan adat istiadat dengan bersandar pada Budaya Melayu.

2. Misi Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditentukan 8 (delapan) Misi pembangunan 2016-2021 yang akan dicapai yaitu:

- 1) Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan.
- 2) Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata.



- 3) Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global.
- 5) Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat.
- 6) Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
- 7) Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan
- 8) Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3. Tujuan Jangka Menengah

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- 1) Misi Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan dengan tujuan :
 - a. Terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan yang sesuai dengan tata ruang.
 - b. Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan Kelautan.
- 2) Misi Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.
 - b. Meningkatkan sarana prasarana pengairan untuk mengurangi resiko bencana.
 - c. Meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana wilayah perbatasan.
- 3) Misi Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dengan tujuan :
 - a. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis.
 - b. Meningkatkan kinerja perencanaan Pembangunan.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparaturnya terhadap hukum dan wawasan kebangsaan.
- 4) Misi Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing.
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.



- c. Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta terpenuhi hak dan perlindungannya.
- 5) Misi Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat dengan tujuan :
 - a. Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu.
 - b. Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan.
- 6) Misi Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
 - c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa.
- 7) Misi Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan dengan tujuan Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga.
- 8) Misi Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh desa dan kelurahan.
 - c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2.1.8 Tingkat Lembaga Kelitbangan

Pelaksana fungsi Kelitbangan di Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan

2.1.9 Jumlah Inovasi Daerah yang dihasilkan

Jumlah Inovasi yang sudah dihasilkan oleh Kabupaten Bintan adalah sebanyak **19** Inovasi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Bab IV.

2.1.10 Kualitas Peningkatan Perizinan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terus meningkatkan pelayanan dibidang perizinan. Hingga tahun 2018 durasi penyelesaian surat menyurat/administrasi perizinan di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu khususnya mencapai 1-17 hari;



Jumlah perizinan non investasi yang dapat diproses dalam tahun 2018 sebanyak 222 izin. Pada tahun 2018 pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melayani 87 jenis perizinan dan non perizinan, hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu. Ada 65 (enam puluh lima) izin untuk pelayanan perizinan dan 22 izin untuk pelayanan non perizinan. Jumlah izin terbit yang dikeluarkan DPMPTSP pada tahun 2018 sebanyak 1062 izin dan 222 pengesahan/keterangan. Jenis izin yang dikeluarkan dapat dilihat pada tabel 2.9

Tabel 2.9 Jenis Perizinan.

No	Jenis Perizinan	Jumlah Yang dikeluarkan
1	Izin Prinsip Penanaman Modal	9
2	Izin Usaha untuk berbagai sektor Usaha	
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	
4	Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha	
5	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	
6	Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha	
7	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	
8	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha	
9	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	80
10	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	37
11	Izin Gangguan	
12	Izin Usaha Kawasan Industri	
13	Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri	
14	Izin Usaha Industri	1
15	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	157
16	Tanda Daftar Gudang (TDG)	14



17	Izin Usaha Perdagangan	115
18	Izin Tempat Usaha – Minuman Beralkohol	17
19	Izin pangkalan gas	
20	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	
21	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	
22	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	
23	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	
24	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	1
25	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	6
26	Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Kegiatan hiburan dan Rekreasi	2
27	Tanda Daftar Usaha Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran	
28	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	
29	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	
30	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	
31	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	1
32	Tanda Daftar Usaha SPA	
33	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	172
34	Izin Lembaga Pelatihan	
35	Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe D	
36	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe D	2
37	Izin Mendirikan Klinik	
38	Izin operasional Klinik	
39	Izin Praktek Bidan	3
40	Izin Kerja Bidan	150
41	Izin Praktek Perawat	215
42	Izin Kerja Perawat	
43	Izin Kerja Perawat Anestasi	



44	Izin Tukang Gigi	
45	Izin Operasional Pemberantasan Hama	1
46	Izin Apotek	1
47	Izin Toko Obat	2
48	Izin Optik	1
49	Izin Pengobat Tradisional	2
50	Izin Air Minum Dalam Kemasan	
51	Izin air minum isi ulang	10
52	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
53	Izin Kerja Refraksionis Optisen/Optimetri	
54	Izin Usaha Angkutan Darat dan Laut	
55	Izin Trayek Angkutan Darat	
56	Izin Operasi Angkutan Darat	
57	Izin Usaha Pelayaran (SIUPP)	
58	Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)	
59	Izin usaha Jasa Pebgurusan Transportasi (JPT)	
60	Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	
61	Izin Usaha Tally	
62	Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas	
63	Izin Praktek Dokter Hewan	1
64	Izin Klinik Hewan	
65	Izin Usaha Perkebunan	
66	Persetujuan Prinsip	1
67	Pemrosesan Administrasi Izin Lokasi	10
68	Sertifikat Laik Fungsi	
69	Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	110
70	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perusahaan Rumah Tangga	
71	Keterangan/Sertifikat Laik Sehat (Tempat pengelolaan makanan,minuman/jasa boga, restoran dan rumah makanan)	52



72	Pengesahan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)	1986
73	Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	14
74	Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	1
75	Pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartit	16
76	Keterangan Berhenti kerja	603
77	Pelayanan Kartu Ak-1	2063
78	Rekomendasi izin penampungan TKI	
79	Rekomendasi izin penempatan tenaga kerja Antar Tenaga Kerja Lokal (AKL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN)	
80	Rekomendasi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/Buruh Lepas	
81	Rekomendasi Izin Lokasi Pelabuhan	
82	Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan	
83	Rekomendasi Izin Operasional Pelabuhan	
84	Rekomendasi Izin Kerja Keruk dan Reklamasi pada Pelabuhan	
85	Pembatalan/Pencabutan Perizinan	3
86	Layanan informasi dan Penanganan Pengaduan	
87	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	
JUMLAH		5859

Selain jenis izin diatas ada beberapa jenis izin yang diterbitkan diantaranya adalah :

1. Surat izin praktek dokter sebanyak 46 izin
2. Surat izin praktek dokter gigi sebanyak 1 izin
3. Surat izin praktek ahli teknologi laboratorium medik sebanyak 3 izin
4. Surat izin kerja radiografer sebanyak 1 izin
5. Izin kerja refraksionis optisen sebanyak 1 izin
6. Tanda daftar usaha budidaya hortikultura sebanyak 1 izin
7. Surat izin kerja ahli gizi sebanyak 1 izin
8. Surat izin praktek apoteker sebanyak 3 izin



9. Surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian sebanyak 2 izin

10. Surat keterangan penelitian sebanyak 45 izin

Jenis izin diatas terbit karena adanya pelimpahan wewenang dari beberapa OPD yang memiliki pelayanan, hal dikarenakan adanya Renaksi KPK tentang pelayanan bahwa semua pelayanan harus berada pada satu pintu di Dinas Penanaman Modal, PTSP.

2.1.11 Jumlah Pengeluaran Perkapita

Table 2.10 Pengeluaran Perkapita

Tahun	Pengeluaran Perkapita (juta)
2016	13,667
2017	13,828
2018	14,256

Sumber : BPS Kabupaten Bintan

2.1.12 Jumlah Peningkatan Investasi

Capaian jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) pada tahun 2018 sebesar 78.656.335.200,71 USD, dengan rincian 77.803.709.075 USD untuk nilai investasi PMA dan Rp.11.935.875.760.000 untuk nilai investasi PMDN. Jumlah nilai investasi PMA/PMDN tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2017. Jumlah nilai investasi dapat dilihat pada Tabel 2.11 dibawah ini :

Tabel 2.11 Jumlah Nilai Investasi

Tahun	Status	Jumlah	Investasi (US\$ /Rp.)		Tenaga Kerja		Realisasi (%)
			Rencana	Realisasi	TKI	TKA	
2015	PMA	199	1,427	1,251	12.144	190	53,09 %
	PMDN	34	2.436.949.956,566	1.457.589.688.831	2.537	-	76,43 %
2016	PMA	199	1.320.838	962.049	11.631	164	72,83 %
	PMDN	61	702.946.000.000	475.257.923.685	3.048	-	67,60 %
2017	PMA	210	2.125.653.539	712.194.039	10.439	160	33,50%
	PMDN	68	8.893.550.760.000	462.654.981.185	2.476	-	5%
2018	PMA	215	77.803.709.075	696.859.452	10.058	159	0,9%
	PMDN	78	11.936.765.760.000	462.654.981.185	2.476	-	3,88

Sumber : LKPJ Kabupaten Bintan, Tahun 2018

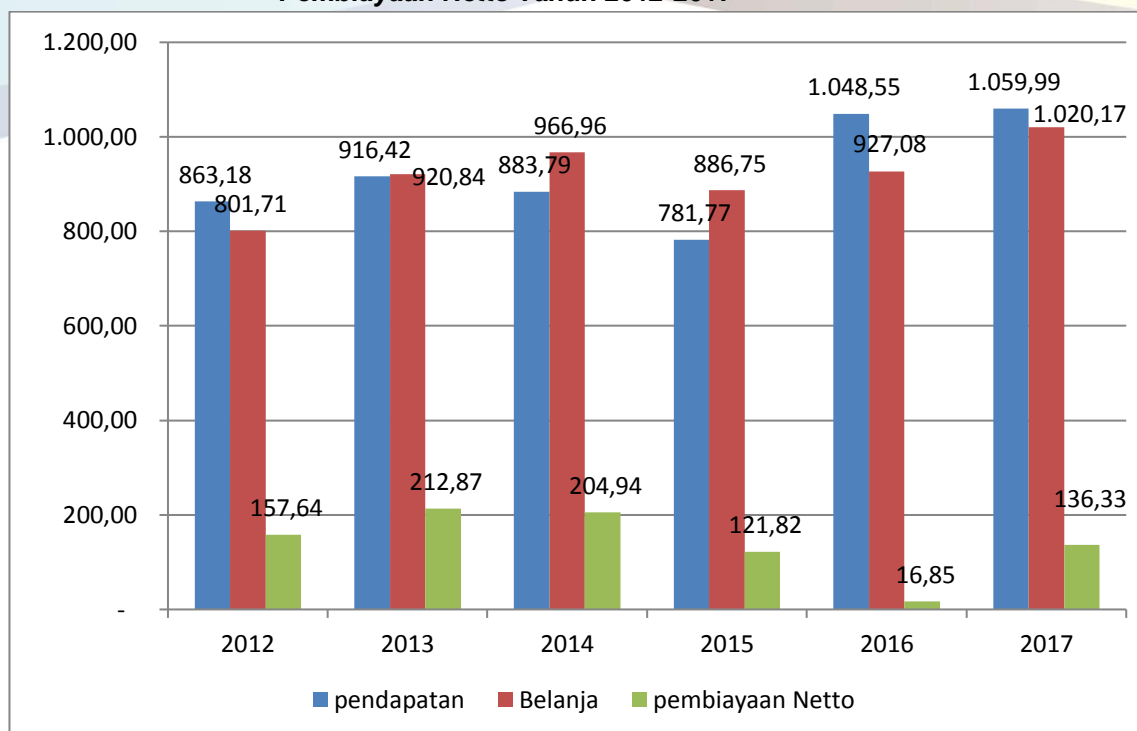
2.1.13 Jumlah Peningkatan PAD

Pada tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Bintan telah mengambil kebijakan dan langkah- langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah guna membiayai belanja daerah. Kebijakan dimaksud disesuaikan dengan asumsi - asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya dalam kerangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.228.484.618.628,00,-. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 198.010.321.117,- maka di tahun 2018 ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 30.474.297.511,00,- atau 15%. Komponen PAD Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan bersumber dari Pajak Daerah diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, PPJ dan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Gambar 2.12 Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Netto Tahun 2012-2017



Sumber: BKAD Kabupaten Bintan Tahun 2018

B. Dana Perimbangan

Penerimaan dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerimaan ini merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat penerimaannya saling mengisi dan melengkapi. Penerimaan dana perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.720.172.457.876,-. Apabila dibandingkan dengan penerimaan dana perimbangan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 691.148.061.294,00,- maka mengalami peningkatan sebesar Rp. 29.024.396.582,00,- atau 4,2%.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber penerimaan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah kabupaten yang terdiri dari PKB, BBN-KB, PBB-KB, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan serta pajak rokok.

Adapun penerimaan lain-lain APBD pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 46.500.000.000,-. Penerimaan ini mengalami penurunan sebesar Rp.



8.978.763.370,- atau 14,53% jika dibandingkan dengan penerimaan APBD tahun 2017 sebesar Rp.61.803.087.000,-

D. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Penerimaan dana penyesuaian terdiri dari dana desa, dan dana insentif daerah sebesar Rp. 39.016.891.000,-. Apabila dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2017 sebesar Rp.29.261.077.000,- penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar Rp.9.755.814.000,- atau 33,34%.

Tabel 2.12 Pendapatan Daerah Tahun 2018

No.	Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan (Rp)	Dasar Hukum
I.	Pendapatan Asli Daerah	228.484.618.628,-	
1.	Pajak Daerah	187.451.200.000,-	Perda Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 dan Perda Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2011
2.	Retribusi Daerah	10.947.000.000,-	Perda Kabupaten Bintan Nomor 3, 4 dan 5 Tahun 2011
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.888.801.932,-	Hasil RUPS Deviden Bank Riau Kepri dan BPR
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	19.197.616.696,-	Giro, Deposito, BLUD dan dana Kapitasi JKN
II.	Dana Perimbangan	653.929.686.000,-	
1	Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.166.259.000,-	Alokasi APBN 2018
2	Dana Alokasi Umum	484.586.669.000,-	Alokasi APBN 2018
3	Dana Alokasi Khusus	123.176.758.000,-	Alokasi APBN 2018
III.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	95.153.914.000,-	-
1	Hibah	0	-
2	Dana Darurat	0	-
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	46.500.000.000,-	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48.653.914.000,-	Alokasi APBN 2018
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	65.090.318.504,96,-	-

Sumber : RKPD Tahun 2018



Dari dana yang tersedia sejumlah Rp. 1.042.658.537.132,96,- disusun program kegiatan OPD yang menyesuaikan dengan target sasaran tahun berjalan RPJMD. Dari ketersediaan dana tersebut, dana yang dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan sanitasi di tahun 2018 sejumlah 1,66% dari total dana APBD atau sebesar Rp. 17.199.770.000,-, dan sebesar 3,13% jika dipersentasekan terhadap total belanja langsung sejumlah Rp. 548.832.176.625,-. Rincian program sanitasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Jika mengamati kembali realisasi APBD Kabupaten Bintan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, kecenderungan (*trend*) pertumbuhan rata-rata penerimaan APBD Kabupaten meningkat sebesar 4,23% atau sama dengan Rp. 92.502.861.866,38,- per tahunnya.

Tabel 2.13

Realisasi APBD Kabupaten Bintan Tahun 2013 - 2017

Tahun	Realiasi APBD (Rp)
Tahun 2013	810.872.827.468,00
Tahun 2014	871.700.333.438,00
Tahun 2015	881.934.274.136,00
Tahun 2016	986.802.757.808,00
Tahun 2017	992.328.198.425,14

Sumber : BPKAD Kabupaten Bintan

2.1.14 Opini BPK

Penyerahan LHP merupakan amanat Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pada tingkat kabupaten/kota, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa BPK ini diserahkan kepada DPRD dan Bupati/Walikota, untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terkait apakah laporan keuangan telah



disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian opini bukan merupakan jaminan terhadap ketiadaan penyimpangan atau kecurangan di dalam laporan keuangan pemerintah.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yaitu:

1. kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi,
2. kecukupan pengungkapan;
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Meski demikian, jika pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran lainnya terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berpotensi atau terindikasi menimbulkan kerugian negara, maka hal ini akan diungkap dalam LHP.

Berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan TA 2018, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Permasalahan yang ditemukan antara lain terkait SPI dan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- Pengelolaan Piutang Penjualan Rumah Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bintan Belum Sesuai Dengan Ketentuan;

Namun demikian, temuan-temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran penyajian atas LKPD Kabupaten Bintan TA 2018. Dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan TA 2018 tersebut, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan TA 2018.

2.1.15 Nilai Capaian LAKIP

Pemkab Bintan kembali meraih **predikat B** dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2018 yang diserahkan oleh Menteri PAN-RB RI, Komjen Syafruddin. Penyerahan penghargaan diterima Bupati Bintan, Apri Sujadi di Ballroom The Trans Luxury Hotel Bandung, Pada tanggal 28 Januari 2019.



Gambar 2.13 Bupati Bintan Apri Sujadi menerima penghargaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2018

2.1.16 Nilai IPM

Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) serta merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada tahun 2014 BPS Indonesia mengubah metodologi perhitungan IPM, hal ini dikarenakan beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, Karena angka melek huruf



di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Selain itu PDB perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; secara teknis penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam perhitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah pada suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi yang lain. Dengan perhitungan IPM metode baru maka indikator yang digunakan lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik. Dengan adanya data rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi, PNB menggantikan PDB juga lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Pada tahun 2017 IPM Kabupaten Bintan diestimasi 72,91 poin meningkat dari tahun 2018 yaitu 73,29 poin.

Tabel 2.14 : Perkembangan IPM Kabupaten Bintan Tahun 2017-2018

No	Tahun	IPM
1	2017	72,91
2	2018***)	73,29

Sumber : LKPJ Kabupaten Bintan, Tahun 2018

**) Data Estimasi

Walaupun IPM di Kabupaten Bintan sudah tergolong tinggi, namun Kabupaten Bintan masih berpotensi untuk meningkatkan angka IPM melalui berbagai usaha secara simultan, baik melalui pendekatan sektoral pendidikan, kesehatan dan ekonomi, maupun secara terintegrasi melalui anggaran pemerintah, swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha, atau kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat meningkatkan capaian IPM menjadi sangat tinggi.

A. Pendidikan

Tolok ukur bidang pendidikan adalah indikator mutu pendidikan yang dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut terdiri atas angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Angka partisipasi kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu atau dengan kata



lain APK tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK yang tinggi menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Sedangkan angka partisipasi murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut, dengan kata lain APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Dikdas 9 tahun serta berdasarkan estimasi Bapelitbang Kabupaten Bintan diketahui bahwa tahun 2017 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD yaitu 97,27% meningkat menjadi 99,69% pada tahun 2018. Artinya pada tahun 2018 ada sebanyak 99,69% penduduk yang berusia 7-12 tahun telah tertampung di SD. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD pada tahun 2017 yaitu 105,01 menjadi 104,62 pada tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa jumlah murid SD yang dapat ditampung pada sekolah-sekolah SD yang ada sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, namun demikian masih banyak murid SD yang berumur kurang atau melebihi usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan SD. Untuk APK jenjang SMP/MTs tahun 2017 adalah 95,72 sedangkan pada tahun 2018 yaitu 97,35. Untuk APM SMP/MTs pada tahun 2017 yaitu 87,61 sedangkan 2018 yaitu 86,73. Jika dilihat berdasarkan komponennya, peningkatan capaian angka IPM Kabupaten Bintan semakin baik. Menurut data hasil olahan Bapelitbang Kabupaten Bintan pada tahun 2017 harapan lama sekolah 12,60 tahun diestimasi meningkat menjadi 12,86 tahun pada tahun 2018. Sedangkan rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia diatas 25 tahun di Kabupaten Bintan pada tahun 2017 yaitu 8,34 tahun dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 8,36 hal ini menunjukkan penurunan angka drop out dari tahun ke tahun sehingga mampu menunjang pencapaian rata-rata lama sekolah yang terus mengalami peningkatan.



Tabel 2.15 : Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan Tahun 2017-2018

No	Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
1	2017	12,60	8,34
2	2018***)	12,86	8,36

Sumber : LKPJ Kabupaten Bintan, Tahun 2019

***) Data Estimasi

Berbagai pencapaian di bidang pendidikan tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan meneruskan implementasi kebijakan penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemerataan pendidikan melalui bantuan kepada siswa kurang mampu, serta melakukan pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah, pemberian bantuan seragam sekolah gratis dan bantuan angkutan sekolah gratis sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Bintan juga memberikan perhatian penting terhadap guru melalui peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru.

B. Kesehatan

Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bintan pada tahun 2017 adalah 70,12 tahun dan menurut data hasil olahan Bapelitbang Kabupaten Bintan AHH diestimasi meningkat menjadi 70,18 tahun pada tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya secara komprehensif serta telah melakukan koordinasi lintas sektoral secara intensif dalam rangka mewujudkan perbaikan bidang kesehatan dengan capaian utama Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan (IK). Angka Harapan Hidup (AHH) dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Pemerintah Kabupaten Bintan masih berusaha keras untuk menekan Angka Kematian Bayi maupun Angka Kematian Ibu saat melahirkan setiap tahunnya dalam rangka membantu mendorong Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup diyakini memiliki hubungan berbanding terbalik terhadap kemiskinan. Peningkatan Angka Harapan Hidup dipercaya mampu menekan bahkan mengurangi angka kemiskinan. Intervensi pemerintah melalui berbagai kebijakan untuk



memperbaiki kondisi kesehatan diharapkan mampu berdampak pada meningkatnya produktivitas golongan miskin, kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Terkait dengan usaha peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Bintan sangat proaktif dalam mendukung implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Perkembangan positif ini sangat mempengaruhi angka Indeks Kesehatan (IK) Kabupaten Bintan.

Tabel 2.16 : Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bintan Tahun 2017-2018

No	Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)
1	2017	70,12
2	2018***)	70,18

Sumber : LKPJ Kabupaten Bintan, Tahun 2019

***) Data Estimasi

C. Daya Beli

Berdasarkan estimasi Badan Penelitian, Pengembangan Statistik Evaluasi dan Perencanaan Kabupaten Bintan pencapaian Pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Bintan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 Pengeluaran perkapita mencapai sebesar 13,83 juta rupiah,- meningkat menjadi sebesar Rp13.92 juta rupiah,- pada tahun 2018. Peningkatan Pendapatan Riil Perkapita Kabupaten Bintan yang meningkat juga menggambarkan Daya Beli masyarakat Kabupaten Bintan yang meningkat. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh kinerja makro dan mikro ekonomi. Hal ini tercermin dari besaran pencapaian pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali.

Tabel 2.17 : Pendapatan Riil Perkapita Masyarakat Kabupaten Bintan, Tahun 2017-2018

No	Tahun	Pendapatan Riil Perkapita (Ribu Rp)
1	2017	13,83



2 2018***)

13,92

Sumber : LKPJ Kabupaten Bintan, Tahun 2019

*** : Data Estimasi

Pada umumnya indikator-indikator IPM berkembang secara steady, namun pendapatan penduduk dan daya beli sangat dipengaruhi oleh kinerja perekonomian. Perekonomian yang kondusif akan memungkinkan terciptanya iklim ekonomi yang prospektif. Iklim perekonomian yang kondusif diharapkan akan membuka kesempatan kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatannya yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Tingkat kondusifitas perekonomian sangat sensitif terhadap perkembangan perkembangan harga (inflasi). Inflasi tinggi akan dapat memberi dampak secara langsung menurunkan daya beli masyarakat. Pengendalian laju inflasi dipercaya akan sangat berdampak dalam menjaga dan menumbuhkan daya beli masyarakat. Mengantisipasi kebijakan makro ekonomi nasional yang mungkin mengalami perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat maka pemerintah daerah Kabupaten Bintan telah melaksanakan program Peningkatan Ketahanan Masyarakat, serta program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dan program lainnya sehingga kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan tertinggal dapat terpenuhi dalam rangka mendukung peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bintan

2.1.17 Penghargaan Bagi Inovator

Kabupaten Bintan .sangat menghargai para inovator di Bintan, bahkan sangat mendorong masyarakat untuk berinovasi. Hal ini di lakukan agar masyarakat Kabupaten Bintan menjadi masyarakat yang inovatif dan berdaya saing. Salah satu bentuk Penghargaan untuk inovator di Kabupaten Bintan adalah diadakannya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG). Dengan TTG juga diharapkan akan mampu mengoptimalkan keberadaan kelembagaan masyarakat yang telah terbentuk di Bintan khususnya pada pos pelayanan teknologi tepat guna (Posyantek).

Besaran Hadiah Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Bintan sebagai berikut:


Tabel 2.18 Besaran Hadiah Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Bintan

NO	URAIAN	DITERIMA
1.	JUARA I	Rp.8.000.000,-
2.	JUARA II	Rp.6.000.000,-
3.	JUARA III	Rp.4.000.000,-
4.	JUARA HARAPAN I	Rp.2.000.000,-
5.	JUARA HARAPAN II	Rp.1.500.000,-
6.	BANTUAN PEMBINAAN PESERTA	Rp.400.000,-

Tabel 2.19 Peserta Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2017

NO	NAMA	UTUSAN	HASIL TTG
1	Hendrianto	Guru SMKN I Binut	Pemanfaatan limbah bulu ayam untuk pertanian
2	Hendrianto	Guru SMKN I Binut	Dongkrak mobil elektrik
3	Jajang	Malang Rapat	Proses pembuatan sign O tree
4	Dwi Noto	Kelurahan Kawal	Kompas alternatif
5	Buchori Ananda Sofriandi	SMP IT Tg Uban	Energi Tanpa Batas
6	M Agus Satria	Bintan Utara	Minuman herbal pare perisa lemon untuk menurunkan glukosa darah
7	Rosidin	Kelurahan Kawal	Cengkeh liquid pengusir lalat
8	Syafitri Nurrisma Diah Aulia	SMP IT Tg Uban	Sepatu Anti Ribut
9	Rasik Khalil Pasha Ardi Hendri Beno Ismufadilah	SMP IT Tg Uban	Tambal ban elektrik ++
10	Wildan Romadhon	Kec. Seri Kuala Lobam	Alarm motor anti maling
11	Anwar	Toapaya	Alat pendeteksi daging busuk menggunakan metode logika fuzzy
12	Anwar	Toapaya	Sistem monitoring penumpukan sampah kontainer berbasis sms gateway



Tabel 2.20 Peserta Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat
Kabupaten Bintan Tahun 2018

NO	NAMA	UTUSAN	HASIL TTG
1	MUSTAFA KAMAL AGEERIO GUNANDA SULASTRI	SMKN 1 GUNUNG KIJANG	Pembuatan Kompos Dari Limbah Lamun
2	MUSTAFA KAMAL SITI SOLEHA AYU SRI REZEKI YULIANA	SMKN 1 GUNUNG KIJANG	Pemanfaatan Daun Resam Sebagai Pestisida Organik Pada Tanaman Hortikultura
3	MUSTAFA KAMAL RIDWANSYAH RESSA AMELIA	SMKN 1 GUNUNG KIJANG	Pemanfaatan Alang-alang Sebagai Kompos Hijau
4	MUSTAFA KAMAL SITI MARYAM RIRIN SOFIANA	SMKN 1 GUNUNG KIJANG	Pembuatan Alat Bantu Semprot Tanaman Sederhana Dari Barang Bekas
5	BETRILIZA, SP DELISA FITRIANTI	SMKN 1 GUNUNG KIJANG	Modifikasi Tempat Persemaian Model Tanjak Dan Keranjang Transplanting
6	DANNY WIRA SABANA NORMAN CRISTOFEL W M RISQI SUHADA ZULKARNAIN	SMK MARITIM LINTAS BARAT TELUK SEBONG	Bubu Lipat Lapis Selang
7	BENO ISMU FADILLAH ARDI HENDRI	SMP IT BAHTERA INSANI/BINTAN UTARA	Alat Perontok Jagung ++
8	WILDAN ROMADHAN JAMALUDIN RAJA ABDUL OMAR A	SERI KUALA LOBAM	Pompa Air Tanpa Listrik
9	WILDAN ROMADHAN JAMALUDIN RAJA ABDUL OMAR A	SERI KUALA LOBAM	Perangkap Laron Elektronik
10	R. RANDIKA DANU S	BINTAN UTARA	AMIGA (Bahan Bakar / Energi Alternatif Pengganti Minyak Dan Gas)
11	ANGGA PRATAMA ADEN YUDI OKTA WISNU	SMKN 1 BINTAN UTARA	Cangkul Praktis Sederhana
12	HENDRIANTO	SMKN 1 BINTAN UTARA	Pengusir Nyamuk ++ Sederhana
13	HENDRIANTO	SMKN 1 BINTAN UTARA	Pengering Bilis/Ikan Asin Tenaga Panas Buangan
14	AFRIE SETIAWAN	TOAPAYA	Piranti Otomatis Pada Peternakan Unggas dan Ikan Demi Tercapainya Lingkungan Yang Sehat dan Modern
15	AFRIE SETIAWAN	TOAPAYA	Super Proteksi Keamanan Pintu Menggunakan Keypad Tanpa Tombol
16	AFRIE SETIAWAN	TOAPAYA	Pembangkit Listrik Tenaga Energi Kinetik Gravitasi (PLTKG) Sebagai Energi Alternatif Ramah Lingkungan



17	AFRIE SETIAWAN	TOAPAYA	Pemanfaatan Barang Bekas Pada Pembuatan Cotton Candy Dilengkapi Dengan Sistem Proteksi Kebakaran Tabung LPG
18	FIRZA BAIHAQI	TOAPAYA	Aplikasi Saklar Lampu Tanpa Tombol Untuk Menghindari Sengatan Listrik
19	KHALIMATUL SAKDIAH	TOAPAYA	Pemanfaatan Panas Kompor Ketika Memasak Untuk Pembangkit Listrik
20	IMAM	POSYANTEK/TOAPAYA	Alat Pembelah Buah Pinang
21	PUJI	POSYANTEK/TOAPAYA	Alat Peraut Daun Kelapa
22	RIO PRIYADI	BINTAN TIMUR	Rumah Kawin Kepiting Bakau
23	NIATI NASUHA AZ ZAHRAWANY MARINI	SMPN 10 BINTAN/BERAKIT	Obat Nyamuk Alami
24	MARIA ULFA, SPD	SERI KUALA LOBAM	List Plang Motif Melayu dari Bahan List Plang GRC
25	HENDRIANTO	SMKN 1 BINTAN UTARA	Inovasi Alat Pembakar Kue Bika Rumping (Karang Buatan)
26	R. WIDY ASMARA N ADY HARI MARYONO ARI SAPUTRA	BINTAN TIMUR	
27	R. WIDY ASMARA N ADY HARI MARYONO ARI SAPUTRA	BINTAN TIMUR	Aerator (Kolam Ikan)

Tabel 2.21 Peserta Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2019

NO	NAMA	UTUSAN	HASIL TTG
1	Adi Febriyanto	Toapaya Utara	Mesin Iris
2	Adi Febriyanto	Toapaya Utara	Tongkat Ajaib
3	Tim TTG SMKN 1 Gn Kijang	Kec. Gunung Kijang	Pembuatan dodol dari buah ketapang untuk oleh-oleh khas bintang
4	Posyantek Desa Malang Rapat	Desa Malang Rapat	Kompos limbah setu
5	Niati (Pelajar) Suyeny (Pelajar)	SMPN 10 Bintang lokasi Desa Berakit	Media tanam tanpa pupuk
6	Tim TTG SMKN 1 Gn Kijang	SMKN 1 Kec. Gunung Kijang	Pot penyimpanan air dan nutrisi untuk tabulampot
7	Tim TTG SMKN 1 Gn Kijang	Kec. Gunung Kijang	Pot kompos
8	M. Andi Nurdin	Desa Teluk Bakau	Metode daur ulang sampah organik dengan pembudidayaan black soldier fly
9	Roza Surono	Bintan Timur	Mesin pegeging sederhana
10	Tim TTG SMKN 1 Gn Kijang	Kec. Gunung Kijang	Perangsang buah organik dari bahan sederhana dan murah
11	Posyantek Desa Malang Rapat	Desa Malang Rapat	Pupuk cair urin sapi



12	SMP IT Bahtera Insani	Bintan Utara	"GERGAJI" Gerobak Galon Ajaib
13	Ilyas	Tambelan	Alat pemotong Kerupuk
14	Posyantek Desa Lancang Kuning	Desa Lancang Kuning	Pompa Air Hidran
15	Wildan Rahmadan	Seri Kuala Lobam	Alat pengiris pisang tanpa listrik
16	Putri Handayani (Tim Rumah Kreatif Tempatan Kijang)	Wacopek Bintan Timur	Inovasi kapal nelayan tradisional sebagai teknologi tepat guna untuk mengurangi sampah laut di Kabupaten Bintan

2.1.18 Optimalisasi CSR

Banyak program-program sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bintan yang tidak teralokasikan dalam APBD Murni maupun APBD Perubahan. Meskipun begitu, Pemkab Bintan akan berupaya agar beberapa program sosial tersebut bisa berjalan.

Upaya yang akan dilakukan pemerintah dengan cara membentuk Forum Corporate Social Responsibility (CSR). Forum CSR sifatnya koordinasi dan memberikan informasi, tidak ada intervensi. Karena, CSR itu merupakan hak dari perusahaan. Dibentuknya Forum CSR, agar semua program CSR dari pihak perusahaan akan lebih terarah, tidak tumpang tindih dengan program yang dijalankan Pemkab Bintan. Ke depan, Forum CSR akan memberikan informasi program pemerintah. Kemudian, perusahaan diberikan informasi, program apa saja yang perlu didukung. Sehingga ketika Pemkab memprioritaskan pendidikan dan kesehatan, perusahaan diminta untuk mendukung melalui CSR. Namun, yang sifatnya belum terakomodir dari pemerintah. Program CSR dapat dialokasikan untuk semua program dari Pemerintah Kabupaten Bintan. Termasuk kegiatan kepemudaan dan olahraga.



1.1.19 Inovasi Daerah di RPJMD

Tabel 2.22 Inovasi pada RPJMD Kabupaten Bintan

Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Satuan	Target Kinerja Akhir							
			2018		2019		2020		Tahun 2021	
			Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan										
Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan				275.000.000		302.500.000		332.750.000		335.000.000



Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Satuan	Target Kinerja Akhir							
			2018		2019		2020		Tahun 2021	
			Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
Jumlah pengembangan inovasi yang dihasilkan	N/A		0		1		0		1	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan										
Program Penelitian dan pengembangan Daerah	N/A	N/A		385.000.000		423.500.000		465.850.000		
Jumlah penelitian yang dihasilkan	N/A	N/A	1		1		1		1	



Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Satuan	Target Kinerja Akhir							
			2018		2019		2020		Tahun 2021	
			Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN										
Urusan Pangan										
Program Peningkatan Ketahanan pangan				970.000.000		720.000.000		2.880.000.000		5.760.000.000
Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	100	%	100		100		100		100	
Ketersediaan Energi Perkapita	2.247	Kkal/kap/hr	2.600		2.730		2.867		3.010	
Ketersediaan Protein Perkapita	66.8	Gram/kap/hr	77.33		81.19		85.25		89.51	



Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Satuan	Target Kinerja Akhir							
			2018		2019		2020		Tahun 2021	
			Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
Jumlah Lokasi Teridikasi Rentan Pangan	9	Desa	4		3		2		1	
Jumlah Diversifikasi Pangan Lokal	3	jenis	8		9		10		10	
Urusan Pertanian										
Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan				250.000.000		320.000.000		350.000.000		500.000.000
Produktivitas tanaman perkebunan	68.8	Ton/ha	8.8		11.8		8.8		11	



Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Satuan	Target Kinerja Akhir							
			2018		2019		2020		Tahun 2021	
			Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
unggulan daerah (ton/ha)										
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan				0		110.000.000		120.000.000		120.000.000
Produktivitas tanaman pangan (ton/ha)	6.253	Ton/Ha	n/a		8.8		8.8		8.8	
Program Peningkatan Produksi. Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Hortikultura				560.680.000		880.000.000		880.000.000		880.000.000



Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Satuan	Target Kinerja Akhir							
			2018		2019		2020		Tahun 2021	
			Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
Ramah Lingkungan										
Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan Daerah (ton/ha)	37.754	Ton/Ha	6.1		6.1		6.1		6.1	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
Program Peningkatan	n/a			1.119.000.000		1.119.000.000		1.119.000.000		1.119.000.000



Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Satuan	Target Kinerja Akhir							
			2018		2019		2020		Tahun 2021	
			Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan										
Jumlah TTG yang dihasilkan per 1000 penduduk	n/a	%	30		40		50		60	



2.1.20 Potensi Unggulan Daerah

Salah satu stimulan peningkatan potensi unggulan daerah Kabupaten Bintan adalah dengan ditetapkannya Kabupaten Bintan sebagai salah satu Kawasan Free Trade Zone. Pembentukan Free Trade Zone di Kabupaten Bintan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Adapun daerah yang termasuk dalam Free Trade Zone Bintan adalah kawasan Bintan Utara dengan liputan wilayah hampir setengah Pulau Bintan. Terdapat 5 lokasi lain yang berupa enclave yaitu kawasan Anak Lobam, kawasan Maritim Bintan Timur, kawasan galang Batang, kawasan Galang Batang, kawasan Senggarang dan kawasan Industri Dompok Barat. Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Kota Tanjungpinang menjadi suatu wilayah administratif yang berdiri sendiri. Dalam hal ini kawasan Senggarang dan kawasan industri Dompok Barat termasuk ke dalam Free Trade Zone Bintan wilayah kota Tanjungpinang. Kawasan Industri Lobam termasuk dalam lingkup Kawasan Bintan Bagian Utara. Free Trade Zone Bintan dengan luas 62.017,20 Ha tersebut saat ini 23.000 Ha merupakan kawasan wisata internasional Lagoi yang dikelola sendiri oleh Penanam Modal Asing dengan core wisata pantai dan golf. Sedangkan seluas 4.000 Ha merupakan kawasan industri Lobam.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Batam, Bintan dan Karimun maka kawasan Free Trade Zone Batam Bintan Karimun mencakup 26 Kecamatan yang 7 kecamatan diantaranya termasuk sebagian wilayah Kabupaten Bintan. Adapun Struktur Ruang Kawasan Free Trade Zone Bintan terdiri dari sistem pusat kegiatan (PK) Primer yaitu:

1. Pusat Kegiatan Berorientasi Ekspor, yaitu kawasan industri Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang, Kawasan Industri Lobam di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kawasan Maritim Bintan Timur di Kecamatan Bintan Timur. Fungsi utama Pusat Kegiatan Berorientasi Ekspor ini adalah pengembangan industri skala besar. Sedangkan fungsi pendukungnya sebagai simpul transportasi, pemukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal.
2. Pusat Kegiatan Pariwisata Mancanegara dan Domestik, yaitu Kawasan Wisata Internasional Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong, Kawasan Wisata Penghujan-Kuala Sempang di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kawasan Wisata Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Kawasan Wisata Sakera di Kecamatan Bintan Utara. Fungsi utama Pusat Kegiatan Pariwisata Mancanegara dan Domestik ini adalah



- pengembangan kepariwisataan. Sedangkan fungsi pendukungnya sebagai pemukiman dan simpul transportasi penumpang.
3. Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa, yaitu Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan, dan Pusat Kegiatan Perdagangan dan jasa tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara. Fungsi utama Pusat Kegiatan Perdagangan dan jasa ini adalah perdagangan dan jasa internasional. Sedangkan fungsi pendukungnya adalah pemukiman, simpul transportasi penumpang dan wisata belanja.
 4. Pusat Kegiatan Transportasi Laut, yakni pelabuhan Bandar Seri Udana dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Bandar Seri Bentan di Kecamatan teluk Bintan, dan Pelabuhan Kijang di Kecamatan Bintan Timur. Fungsi Utama Pusat Kegiatan Transportasi Laut ini adalah pertransportasian. Sedangkan fungsi pendukungnya adalah pelayanan perpindahan penumpang dan barang.
 5. Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara, yakni Mentigi di Kecamatan Bintan Utara, Gunung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong, dan Tanjung Berakit dan Tanjung Sading di Kecamatan Teluk Sebong. Fungsi utama Pusat Kegiatan Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara ini adalah pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan fungsi pendukungnya adalah menjaaga kedaulatan KNRI yang meliputi pertahanan dan keamanan laut serta udara.
 6. Pusat Kegiatan Kesehatan, Kawasan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan, dan Kawasan Perkotaan Tanjung Uban dan Kawasan Seri Kuala Lobam di Kecamatan Bintan Utara. Fungsi utama Pusat Kegiatan Kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan berkualitas internasional. Sedangkan fungsi pendukungnya penyediaan pelayanan perkotaan.

Selain itu melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017, KEK Galang Batang resmi ditetapkan dan telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagai bentuk upaya pengembangan potensi perindustrian Kabupaten Bintan. KEK yang berlokasi di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tersebut memiliki luas lahan sebesar 2.333,6 Ha. KEK Galang Batang akan terdiri atas 4 zona yaitu: Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, dan Zona Energi. KEK ini akan dikembangkan sebagai kawasan basis industri pengolahan dan pemurnian bijih bauksit (refining) menjadi



alumina, pengolahan alumina menjadi aluminium ingot (smelting), energi, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), logistik, pengembangan pelabuhan bongkar muat dan lainnya. Sektor pertambangan dan penggalian telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Bintan. Dengan ditetapkannya KEK Galang Batang sebagai tempat pemusatan kegiatan industri dengan pengolahan produk dari hulu ke hilir, KEK ini diperkirakan akan menarik investasi senilai Rp 36,25 triliun selama 6 tahun ke depan. Selain itu, KEK Galang Batang juga diproyeksikan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 23.200 orang.

Kabupaten Bintan masih mengandalkan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang PDRB terbesar pada 5 tahun terakhir dengan kontribusi mencapai 38,54%. Spill over effect pembangunan Singapura dan Malaysia yang merupakan kutub utama pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara telah berimbas pada perkembangan Industri di Kabupaten Bintan sebagai pendukung sektor industri Singapura. Sedangkan sub sektor Pariwisata dan jasa merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar di Kabupaten Bintan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 PAD dari sub sektor pariwisata mencapai Rp148 Milyar atau mencapai 58,66% dari total realisasi PAD Kabupaten Bintan tahun 2018.

2.1.21 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Berdasarkan hasil olahan data maka PDRB Kabupaten Bintan pada tahun 2018 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 diestimasi sebesar Rp.14,08 trilyun,- meningkat dari tahun 2017 yaitu Rp.13,36 trilyun,- yang diukur dari tujuh belas sektor lapangan usaha yaitu:

Tabel 2.23 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017-2018

No	Lapangan Usaha	2017	2018 ***)
SEKTOR PRIMER		2,183.77	2,093.57
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	822,2	871.37
2	Pertambangan dan Penggalian	1,361,57	1,222.20
SEKTOR SEKUNDER		7,542.68	8,086.84
3	Industri Pengolahan	5,223,05	5,568.46



4	Pengadaan Listrik dan Gas	19,99	21.57
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,41	8.96
6	Konstruksi	2,291,23	2,487.84
SEKTOR TERSIER		3,638.27	3,901.76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,289,83	1,394.66
8	Transportasi dan Pergudangan	311,71	320.63
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	708,29	768.53
10	Informasi dan Komunikasi	194,76	206.34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	239,75	257.65
12	Real Estate	158,65	169.20
13	Jasa Perusahaan	0,13	1.41
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	321,07	343.91
15	Jasa Pendidikan	259,04	275.07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129,92	138.26
17	Jasa lainnya	25,12	26.11
PDRB KONSTAN		13,364.7	14,080.89

Sumber : LKPJ Kabupaten Bintan, Tahun 2018

***):Data Estimasi

Sektor-sektor yang memiliki nilai kontribusi besar terhadap PDRB adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 39,54%; sektor konstruksi 17,66%; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,90%; sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 8,66%, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,45%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.24 : Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017-2018

No	Lapangan Usaha	2017	2018 ***)
SEKTOR PRIMER			
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,47	6.19
2	Pertambangan dan Penggalan	7.23	8.68
SEKTOR SEKUNDER			
3	Industri Pengolahan	40.70	39.55
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.13	0.15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	0.06
6	Konstruksi	18.13	17.67
SEKTOR TERSIER			
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.03	9.90
8	Transportasi dan Pergudangan	2.33	2.28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.10	5.46
10	Informasi dan Komunikasi	1.11	1.47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.62	1.83
12	Real Estate	1.11	1.47
13	Jasa Perusahaan	0.00	0.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.80	2.44
15	Jasa Pendidikan	2.03	1.95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.97	0.98
17	Jasa lainnya	0.17	0.19
PDRB BERLAKU		100	100



Sumber : LKPJ Kabupaten Bintan, Tahun 2018

***): Data Estimasi

Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil digunakan PDRB Harga Konstan. PDRB Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih yaitu tahun 2010. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Pada tahun 2017 LPE Kabupaten Bintan adalah 5,01% mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 5,36%. Peningkatan LPE di Kabupten Bintan pada tahun 2018 disinyalir sebagai imbas dari pemulihan ekonomi global yang lebih baik dibandingkan kerkiraan sebelumnya, dampak pemulihan ekonomi dunia ini menyebabkan volume perdagangan dunia meningkat, yang selanjutnya mendorong peningkatan harga komoditas dunia. Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh peningkatan ekspor komoditas serta akselerasi investasi.

Tabel 2.25 : Laju Pertumbuhan Persektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2018

No	Lapangan Usaha	2017	2018 ***)
SEKTOR PRIMER			
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.89	5.98
2	Pertambangan dan Penggalian	-14.1	-10.24
SEKTOR SEKUNDER			
3	Industri Pengolahan	7.28	6.61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.93	7.88
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.31	6.5



6	Konstruksi	9.64	8.58
SEKTOR TERSIER			
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.42	2.86
8	Transportasi dan Pergudangan	8.81	8.5
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.99	5.94
10	Informasi dan Komunikasi	1.11	1.47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.62	1.83
12	Real Estate	1.11	1.47
13	Jasa Perusahaan	0.00	0.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.80	2.44
15	Jasa Pendidikan	2.03	1.95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.97	0.98
17	Jasa lainnya	0.17	0.19
PDRB BERLAKU		100	100